

PERANAN KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOMISI E

THE ROLE OF POLITICAL COMMUNICATIONS IN IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE MEMBERS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF COMMISSION E

Cut Alma Nurafiah¹, Delfi Iman Madani Siregar²

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Dharmawangsa

Jl. K.L Yos Sudarso No. 224, Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan,
Sumatera Utara 202115

Email: siregardelfi94@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini tentang bagaimana peranan komunikasi politik dalam peningkatan kinerja anggota DPRD komisi E dapil I di kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan komunikasi politik dalam peningkatan kinerja anggota DPRD komisi E dapil I di kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penentuan informan dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu, teknik pengambilan data di mana informan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Pengumpulan data dengan cara metode wawancara, observasi, dokumentasi, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD komisi E sebelumnya, adapun pencapaian kinerja dari anggota DPRD komisi E yang sekarang dibandingkan periode sebelumnya jauh lebih baik. Berdasarkan teknik analisis data dengan menggunakan Miles dan Huberman dimulai dengan reduksi data dan penyajian data dan penarikan kesimpulan cukup memberikan gambaran bahwa dari hasil penelitian ini menunjukkan peran komunikasi politik DPRD komisi E dapil I di kecamatan Medan Perjuangan cukup baik dalam peningkatan kinerja DPRD Sumatera Utara komisi E dapil I di kecamatan Medan Perjuangan.

Kata kunci : Peningkatan kinerja, peranan komunikasi politik.

ABSTRACT

The problem in this study is about the role of political communication in improving the performance of members of the DPRD Commission E electoral I in Medan Perjuangan sub-district, Medan City. This study aims to determine the role of political communication in improving the performance of members of the DPRD Commission E electoral I in Medan Perjuangan sub-district, Medan City. This research use descriptive qualitative approach. Determination of informants using purposive technique, namely, data collection techniques in which informants can provide the information needed by researchers. Collecting data by means of interview methods, observation, documentation, the results of this study state that there is some dissatisfaction from the public with the performance of the previous members of the DPRD Commission E, while the performance

achievement of members of the DPRD Commission E, which is now much better than the previous period. Based on data analysis techniques using Miles and Huberman starting with data reduction and data presentation and drawing conclusions it is sufficient to illustrate that the results of this study show that the political communication role of the DPRD Commission E electoral district I in Medan Perjuangan sub-district is quite good in improving the performance of the DPRD North Sumatra Commission E. electoral district I in Medan Perjuangan sub-district.

Key words: Performance improvement, the role of political communication.

A.PENDAHULUAN

Politik adalah pengambilan keputusan bukan untuk kepentingan perorangan, melainkan untuk kepentingan orang banyak, cita-cita politik harus di arahkan untuk menciptakan individu yang memiliki komitmen untuk menjadi negarawan. Nasib rakyat lebih banyak ditentukan oleh pemimpin politik. Kajian tentang pemimpin politik penting untuk dilakukan. Salah satu kajian yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan komunikasi politik. Komunikasi politik diibaratkan sebagai sirkulasi darah dalam tubuh.

Komunikasi politik memiliki filosofi, yakni pendayagunaan sumber daya komunikasi apakah itu sumber daya manusia, infrastruktur, maupun piranti lunak untuk mendorong terwujudnya sistem politik yang mengusung demokrasi, dimana kekuasaan menjalankan pemerintahan ada ditangan pemenang pemilu (mayoritas).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bab VII tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 57 menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Begitu juga dengan Pasal 148 ayat (1) menyebutkan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan dari DPRD adalah merupakan mitra kerja bersama Kepala Daerah.

Peranan komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatra Utara atau disingkat DPRD-SU merupakan hal yang sangat berpengaruh mendorong peningkatan kinerja dari anggota DPRD SU sebagai lembaga legislatif. DPRD-SU merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah Sumatra Utara yang memiliki kinerja dan tugas-tugas pokok untuk mengawal kebijakan eksekutif di tingkat daerah dan menyuarakan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah daerah Provinsi Sumatra Utara.

Provinsi Sumatra Utara sendiri terdiri dari 33 kabupaten dan kota dan memiliki 12 daerah pemilihan atau disingkat Dapil. Tentulah tugas DPRD-SU untuk menerima seluruh aspirasi

yang disampaikan oleh masyarakat yang berada di kabupaten dan kota berdasarkan daerah pemilihan tersebut agar disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Komisi E merupakan salah satu komisi yang ada pada alat kelengkapan di DPRD Sumatera Utara yang menaungi bidang kesejahteraan rakyat meliputi, ketenaga kerjaan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, agama, sosial, kebudayaan, kesehatan, peranan wanita, dan transmigrasi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul dalam tulisan ini sekaligus ingin mengetahui bagaimana peranan komunikasi politik dalam peningkatan kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah komisi E (Studi kasus kinerja anggota DPRD dapil I, kecamatan Medan Perjuangan, kota Medan).

B. LANDASAN TEORI

Komunikasi Politik

Arifin Rahman menyatakan, komunikasi politik merupakan salah satu input dari sistem politik, dimana politik ini menggambarkan proses informasi-informasi politik. Sedangkan menurut Alfian komunikasi politik yang diasumsikan yang menjadi sistem politik itu hidup dan dinamis. Komunikasi politik mempersembahkan semua kegiatan dari sistem politik sehingga aspirasi dan kepentingan dokonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan.

Komunikasi politik disamping semua bagian dari sistem politik, dapat pula menentukan kualitas tanggapan dari sistem politik itu sendiri. Bilamana komunikasi politik berjalan dengan lancar, wajar dan sehat maka akan meningkatkan kualitas responsif yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta tuntutan perubahan zaman. Lucian Pye menyatakan, komunikasi politik merupakan seluruh proses-proses sosial yang dapat dianalisis dalam pengertian struktur, kandungan dan aliran komunikasi.

Unsur-unsur dalam komunikasi politik umumnya terdiri dari komunikator, komunikan, pesan, media, tujuan, efek dan sumber komunikasi. Semua unsur ini berada pada dua struktur politik, yakni infrastruktur dan suprastruktur politik. Dari kerangka tersebut dapat diasumsikan bahwa komunikasi semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Lebih jauh Lucian Pye menyatakan bahwa ada enam bagian skenario berfikir, yaitu:

Komunikasi merupakan cara dan teknik penyerahan sejumlah tuntutan dan dukungan sebagai input dalam sistem politik, misalnya dalam rangka artikulasi kepentingan.

Komunikasi digunakan sebagai penghubungan antara pemerintah dengan rakyat, baik dalam rangka mobilisasi sosial untuk implementasi tujuan, memperoleh dukungan,

memperoleh kepatuhan dan integritas politik. Komunikasi juga digunakan sebagai bentuk *feedback* atas sejumlah output (kebijakan pemerintah)

Komunikasi menjalankan fungsi sosialisasi politik kepada warga negara.

Komunikasi menjalankan peran memberi ancaman (*coercion*) sekaligus juga memberikan batasan-batasan mengenai hal-hal yang ditabukan untuk membatasi ruang gerak aktifitas politik masyarakat.

Komunikasi mengkoordinasikan tata nilai politik yang diinginkan, sehingga mencapai tingkat hegemonitas yang relatif. Hegemonitas nilai-nilai politik ini sangat menentukan stabilitas politik.

Komunikasi sebagai kekuatan kontrol sosial yang memelihara *idealism social* dan keseimbangan politik.

Bagi Lasswell, ilmu politik adalah ilmu tentang kekuasaan. Berbeda dengan David Easton dalam mendefinisikan politik sebagai berikut:

“Political as a process those developmental processes through which person acquire political orientation and patterns of behavior”

Kerangka yang diberikan ilmu komunikasi bagi komunikasi politik adalah sebagaimana digambarkan dalam paradigma Laswell: siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa dan dengan akibat apa. Paradigma ini mengklaim bahwa unsur-unsur komunikasi tersebut berlaku dalam setiap proses komunikasi, dan berlaku inheren dalam komunikasi politik. Walaupun dipandang sangat “berbau” mekanistik, dan karenanya berimplikasi simplistik dan linier, penghampiran ini berjasa untuk menelaah komunikasi politik lebih lanjut.

Kinerja

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar "kerja" yang menterjemahkan kata dari bahasa asing yaitu prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Konsep kinerja (*Performance*) dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja bisa juga dapat dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi.

Sedangkan menurut Mahsun kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa kinerja adalah seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan program/kebijakan/ visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Lohman indikator kinerja adalah suatu variable yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektifitas dan efisiensi proses dengan pedoman pada target-target dan tujuan organisasi (Mahsun, 2006:71). Indikator untuk mengukur kinerja secara individu ada enam indikator yaitu;

Kualitas, kualitas kerja diukur dari persepsi individu terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan individu.

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi “tenaga, uang teknologi, bahan baku” dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

Kemandirian merupakan tingkat seorang individu yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya.

Komitmen kerja merupakan suatu tingkat dimana individu memiliki komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, indikator kinerja adalah kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan yang diwujudkan dalam ukuran – ukuran tertentu. Untuk menilai kinerja tersebut tentu saja diperlukan indikator-indikator atau kriteria – kriteria untuk mengukurnya secara jelas, tanpa indikator yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif diantara alternatif alokasi sumber daya yang berbeda, alternatif desain-desain yang berbeda, dan diantara pilihan - pilihan pendistribusian tugas dan wewenang.

Sulit untuk ditemukan alat ukur kinerja yang sesuai. Bila dikaji dari tujuan dan misi utama dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan. Ukuran kinerja terlihat sederhana, namun tidaklah demikian kenyataannya, karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan tentang ukuran kinerja.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah lembaga perwakilan di daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Dewan perwakilan rakyat juga berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah.

Dewan perwakilan rakyat daerah sebagai wakil rakyat dituntut untuk selalu berkomunikasi dengan rakyat yang diwakilinya, agar mampu menyerap keinginan masyarakat dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dan dihadapi oleh masyarakat.

Lembaga ini disebut parlemen karena kata "*parle*" berarti bicara, artinya mereka harus menyuarakan hati nurani rakyat, artinya setelah mengartikulasikan dan mengagresikan kepentingan rakyat, mereka harus membicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintah pusat yang berkuasa. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk untuk mengkritisi pemerintah pusat di daerah mengkritisi pemerintah daerah baik propinsi atau kabupaten/ kota sesuai tingkatnya. Jadi pemerintah eksekutif mempunyai peranan mengurus sedangkan legislatif mempunyai fungsi untuk mengatur dengan begitu bagi daerah yang belum memiliki lembaga legislatif pada tingkat dibawah propinsi disebut pembantu gubernur (dulu resident) dan pada tingkat dibawah kabupaten disebut pembantu bupati (dulu kewedanaan) tingkat kota disebut kota *administratif*.

Untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugasnya, dapat diberi berbagai hak dan kewajiban oleh undang-undang dasar 1945 yaitu :

Hak petisi (hak untuk mengajukan pertanyaan bagi setiap anggota)

Hak *budget* (untuk menetapkan anggaran dan pendapatan belanja negara/daerah)

Hak interpretasi (untuk meminta keterangan terutama pada eksekutif)

Hak amandemen (untuk mengadakan perubahan peraturan)

Hak angket (untuk mengadakan penyelidikan karena diduga terlibat kasus)

Hak inisiatif (untuk mengajukan rancangan undang-undang)

Hak untuk menyatakan pernyataan pendapat

Sedangkan kewajiban DPR yaitu sebagai berikut :

Mempertahankan Pancasila dan UUD 1945

Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah

Memperhatikan aspirasi masyarakat

Kemudian dalam memperlancar tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai alat kelengkapan yaitu

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Fraksi-fraksi

Komisi-komisi

Badan musyawarah

Badan urusan rumah tangga

Badan kerjasama antar parlemen

Panitia khusus (pansus)

Tentang tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini mengandung pengertian mendelegasikan secara penuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyusun peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak proporsional. Untuk menghindari adanya peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak proporsional didalam rangka koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah melalui beberapa peraturan pemerintah telah mengatur tentang pelaksanaan penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi cenderung diabaikan. Alasan yang diberikan adalah dalam undang-undang tidak dinyatakan bahwa pedoman pelaksanaan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diatur dalam peraturan pemerintah.

DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :

Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah.

Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)

Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Tugas dan wewenang DPRD adalah:

Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.

Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Mengusulkan:

Untuk DPRD provinsi, pengangkatan / pemberhentian gubernur / wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.

Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan perwakilan rakyat daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai dewan perwakilan rakyat daerah mempunyai fungsi:

Legislasi, Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah membentuk peraturan daerah bersama *legislative*.

Anggaran, Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah.

Pengawasan, Dan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

C.METODE

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, mendeskripsikan data tanpa mengoperasionalkan konsep atau menguji konsep padarealitas yang diteliti (Rachmat Kriyantono, 2008 : 65-67). Riset deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian (Bilson Simamora, 2004 : 104).

Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan yang dijadikan teman bahkan konsultan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti dengan menggunakan teknik purposive yaitu, teknik pengambilan sampel di mana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian (Salim dan Syahrudin, 2010 : 142). Dengan menggunakan Teknik ini, peneliti menentukan informan penelitian. Adapula informan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD SU komisi E bapak dr. Mustafa Kamil Adam Sp, PD dan masyarakat di kecamatan Medan Perjuangan yakni bapak Syahrudin dan ibu Cica.

Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data kualitatif menurut Lincoln & Guba (1985) menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen. Wawancara, observasi berpartisipatif, dan kajian dokumen saling mendukung dan melengkapi dalam memenuhi data yang diperlukan sebagaimana focus penelitian (Salim dan Syahrudin, 2010 : 114).

- a. Wawancara, dengan anggota DPRD komisi E dr. Mustafa Kamil Adam Sp, PD. dan masyarakat kecamatan Medan Perjuangan.
- b. Observasi, pengumpulan data dengan menggunakan observasi berpartisipatif ditunjukkan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian dari setting tertentu, yang merupakan perhatian esensial dalam penelitian kualitatif. Observasi berpartisipatif dilakukan untuk mengamati obyek penelitian, seperti tempat khusus suatu organisasi, sekelompok orang atau beberapa aktivitas. (Salim dan Syahrudin, 2010 : 114).
- c. Dokumentasi, mengumpulkan data melalui dokumen umum, jurnal, surat, tabloid, koran, dan lain-lain.

Teknik Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman (1994) terdiri dari, (a) reduksi data (b) penyajian data, (c) kesimpulan, dimana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung. Tegasnya, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan suatu jalin – menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang umum disebut analisis.

D.HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan ketiga informan, bapak Mustafa, bapak Syahrudin, dan ibu Cica di kecamatan Medan Perjuangan dapat di paparkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Bagaimana menurut bapak peran komunikasi politik dalam peningkatan kinerja DPRD Provinsi Sumatera utara di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Komisi E Dapil I Sumut Kecamatan Medan Perjuangan?

“Dalam peningkatan kinerja Komisi E kita kembali kepada fungsi atau tufoksi dari Komisi E. seperti yang diketahui bahwa DPRD Sumatera Utara ini adalah bertugas sebagai controlling atau pengawasan, budgeting, dan juga legislasi membuat peraturan daerah (Perda). Di dalam hal ini Komisi E tentu memiliki partner di Pemerintahan Daerah

Sumatera Utara yaitu; Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan lainnya. Tentu dalam peningkatan kinerja ini semua sumber daya yang ada di Dinas tersebut tentu akan diselaraskan dengan kebutuhan atau aspirasi dari Kecamatan Medan Perjuangan. Jadi Kecamatan Medan Perjuangan baik di tingkat Muspika maupun dibawahnya sampai dengan kepada rakyat apa yang diinginkan dalam aspek Dinas – dinas tersebut misalkan, soal pendidikan apakah ada permasalahan pendidikan maka jika ada akan disalurkan kepada Dinas – dinas terkait. Karena yang mengeksekusi ialah pihak Eksekutif (Pemerintah) kami di DPRD hanya sebagai fasilitator atau bisa disebut sebagai pendorong supaya kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur itu dapat terselenggara di Kecamatan Medan Perjuangan. Sehingga dengan demikian kinerja dari DPRD Sumatera Utara bisa meningkat melalui peningkatan kinerja Pemerintahan itu sendiri. Jadi kalau Pemerintahan Sumatera Utara menanggapi atau melaksanakan aspirasi dari pihak kecamatan tentu kinerja DPRD Sumatera Utara akan lebih baik dan kinerja Pemerintah akan lebih baik sehingga kemajuan – kemajuan dan tujuan – tujuan dan keinginan masyarakat itu akan terpenuhi”. (Bpk dr. Mustafa Kamil Adam Sp,PD. di DPRD Sumatera Utara, Selasa, 15 Desember 2020, pukul 14.00 WIB)

Apakah menurut bapak peran komunikasi politik penting dalam meningkatkan kinerja anggota DPRD Sumatera Utara khususnya Komisi E Dapil Sumut I, Kecamatan Medan Perjuangan? Jika iya berikan alasannya kenapa komunikasi politik itu begitu penting.

“Kita kembali kepada komunikasi politik. Komunikasi politik itu artinya, komunikasi untuk mempengaruhi orang sehingga orang tersebut mau berbuat sesuai dengan keinginan kita. Tapi demi tujuan – tujuan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi tentunya penting bagaimana kita membina komunikasi itu sehingga baik di tingkat bawah Kecamatan maupun di tingkat orizontal atau sesama anggota DPRD yang lain maupun di tingkat Pemerintah yaitu sebagai partner kerja dari DPRD Sumatera Utara yaitu Dinas – dinas Pemerintahan yang menjadi partner DPRD Sumatera Utara tersebut dapat menerima komunikasi dari DPRD Sumatera Utara dan apa yang diinginkan dari masyarakat yang dilakukan melalui penyerapan aspirasi anggota DPRD Sumatera Utara kepada masyarakat secara langsung ataupun yang didapat dari pemikiran yang sehat dari anggota DPRD Sumatera Utara dan juga dari pihak yang lain. Bahwa misalnya kami harus melakukan yang terbaik tentu itu sudah kami pertimbangkan. Jadi keinginan kami itu dapat kami kemas dan kami bujuk atau kami suite artinya dapat kami yakinkan pihak Pemerintahan atau pihak terkait (Dinas terkait) agar program – program dari Komisi E tersebut itulah yang terbaik untuk rakyat dan sehingga program tersebut dapat terprogramkan atau dijadikan kinerja bagi Pemerintahan. Jadi menurut saya komunikasi politik itu sangat penting supaya komunikasi itu dapat diterima artinya dengan bagaimana kami dapat meyakinkan Pemerintah Daerah sehingga dia dapat menerima dengan keyakinan agar apa yang kami inginkan menjadi terlaksana. Jadi tujuan komunikasi politik ialah persepsi yang sama dan keinginan yang sama. Jika Eksekutif dan Legislatif memiliki keinginan dan persepsi yang sama tentu tujuan – tujuan untuk kesejahteraan rakyat tersebut menjadi mudah dan cepat tercapai”. (Bpk dr. Mustafa Kamil Adam Sp,PD. di DPRD Sumatera Utara, Selasa, 15 Desember 2020, pukul 14.00 WIB)

Menurut bapak kapan dan bagaimana komunikasi politik digunakan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kinerja anggota DPRD Sumatera Utara khususnya Komisi E Dapil I Sumatera Utara, Kecamatan Medan Perjuangan? Dan strategi komunikasi politik apa yang digunakan oleh anggota DPRD Sumatera Utara untuk meningkatkan kinerjanya tersebut?

“Menurut kami untuk strateginya adalah menurut saya komunikasi politik harus dibina sesama anggota DPRD Sumatera Utara yang ada di Komisi E sehingga suatu keinginan, program, atau apa yang harus dikerjakan. Misalnya di Dinas Kesehatan apa yang harus dilakukan dalam segala hal apapun itu dalam bentuk program ataupun dalam bentuk proyek maka keinginan itu bagusnya strateginya harus kita komunikasikan sesama anggota DPRD Sumatera Utara yang ada di Komisi E. Jadi diserap dan dikomunikasikan kepada seluruh partai yang ada disitu dan lintas partai. Semua partai yang ada di DPRD Sumatera Utara ada di Komisi E. Jadi kalau semua anggota DPRD Sumatera Utara itu sepakat satu visi dengan apa yang akan dilakukan sepakat dan dengan kesepakatan itulah diteruskan ke Eksekutif supaya dilaksanakan. Sehingga karena anggota DPRD Sumatera Utara kompak dalam istilahnya meyakinkan pihak Eksekutif inilah yang terbaik. Karena seluruh anggota DPRD Sumatera Utara kompak mau tidak mau akan menerima itu apa proyek dan apa programnya yang kita inginkan dan kita juga berkeyakinan dan kita kompak karena memang itu kita dapatkan dari aspirasi yang kita terima dari Kecamatan Perjuangan, dari Muspikanya dan juga dari masyarakat itu sendiri. Misalnya dari Reses hasil dari pokok – pokok pikiran (Pokir) tersebut disamakan jadi menghasilkan satu kesepakatan yang sama satu hati, satu pikiran dari Komisi E kami bawa dan kami perjuangkan bersama – sama pasti akan tercapai. Jadi itulah strateginya. Jadi kita samakan dulu persepsi kita samakan dulu keyakinan dari anggota DPRD Sumatera Utara di Komisi E tersebut saya rasa akan mencapai tujuan dan hasil yang terbaik. Jadi tidak boleh berbeda – beda sebenarnya komunikasi politik itu harus dibina secara intern terlebih dahulu sesama anggota DPRD Sumatera Utara. Dan memang betul – betul komunikasi politik itu kita dapat kontennya dari masyarakat dan itulah yang menjadi kebutuhan rakyat banyak sehingga dengan demikian kita berani mengutarakannya kepada anggota yang lain untuk kita utarakan kepada pihak Eksekutif atau kepada pihak – pihak lain yaitu Dinas – dinas terkait di Komisi E”. (Bpk dr. Mustafa Kamil Adam Sp,PD. di DPRD Sumatera Utara, Selasa, 15 Desember 2020, pukul 14.00 WIB)

Menurut bapak siapa yang menjadi target sasaran dalam penggunaan komunikasi politik yang digunakan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara khususnya Komisi E untuk peningkatan kinerja anggota DPRD Sumatera Utara? Dan apakah ada faktor – faktor pendukung untuk hal tersebut dan seperti apa polanya dari komunikasi politik yang digunakan?

”Jadi kita kembali kepada komunikasi politik tentu yang berkomunikasi itu adalah politikus yaitu orang politik contohnya seperti saya. Saya ini anggota DPRD Sumatera Utara bekerja di lembaga politik tentulah saya disebut politikus. Tentulah komunikasi yang saya lakukan tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja saya. Jadi komunikasi saya tersebut polanya adalah mungkin bertemu langsung secara tatap muka dengan orang banyak atau bisa saja komunikasi yang saya lakukan kepada orang ataupun sebaliknya dan juga dari antar kelompok masyarakat tertentu atau sebaliknya jadi polanya tersebut begitu. Tentu komunikasi yang saya lakukan ialah dari bermacam arah artinya, vertikal ataupun horizontal. Secara vertikal saya berkomunikasi kepada pihak – pihak yang ada di Kementerian atau di DPR RI. Kalau secara horizontal saya berkomunikasi dengan anggota DPRD yang lain atau dengan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara dan juga kepada rakyat. Misalkan disebutkan dalam pertanyaan ini Kecamatan Medan Perjuangan ya ke rakyat Medan Perjuangan ataupun stakeholder yang ada di Kecamatan Medan Perjuangan. Kita kembali kepada tujuan komunikasi politik ialah untuk mendapatkan agar tujuan – tujuan politik saya tercapai. Sejujurnya untuk mencari kekuasaan jadi komunikasi politik saya agar orang lain sependapat dengan pendapat saya dengan tujuan saya jadi tujuan – tujuan politik saya tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas. Kekuasaan

politik saya ini akan saya kembalikan untuk mencapai tujuan – tujuan saya yaitu untuk kesejahteraan dan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat”.(Bpk dr. Mustafa Kamil Adam Sp,PD. di DPRD Sumatera Utara, Selasa, 15 Desember 2020, pukul 14.00 WIB)

Bagaimana menurut bapak/ibu kinerja DPRD Sumatera Utara Komisi E Dapil I kecamatan Medan Perjuangan?

“Menurut saya kinerja anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil I kecamatan Medan Perjuangan baik”. (BapakSyahruldi kediamannya, Selasa, 08Desember 2020, pukul 18.00 WIB)

“Kalau melihat fakta yang ada kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil I kecamatan Medan Perjuangan sangat baik misalkan dengan penyerapan aspirasi yang dilakukan pada saat reses di daerah pemilihan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara Komisi E di Kecamatan Medan Perjuangan”. (Ibu Cicadi kediamannya, Senin, 07Desember 2020, pukul 16.00 WIB)

Apakah kinerja anggota DPRD Sumatera Utara Komisi E telah mempengaruhi kesejahteraan rakyat di kecamatan Medan Perjuangan ?

“Sudah cukup mempengaruhi, namun ada beberapa hal yang belum juga contohnya dibidang kesehatan seperti BPJS kesehatan terutama KIS dan PIB”. (Bapak Syahruldi kediamannya, Selasa, 08Desember 2020, pukul 18.00 WIB)

“Saya melihat bahwasanya tingkat kesejahteraan dari rakyat di kecamatan Medan Perjuangan memang masih belum sepenuhnya diperhatikan apalagi di tengah kondisi pandemik saat ini. Namun memang tidak seluruhnya kesejahteraan dari masyarakat yang belum terpenuhi misalkan bantuan seperti PKH, pendidikan, dll sudah sangat diperhatikan”.(Ibu Cicadi kediamannya, Senin, 07 Desember 2020, pukul 16.00 WIB)

Sejauh ini apa yang telah dilakukan anggota DPRD Sumatera Utara Komisi E di daerah pemilihan I (Kecamatan Medan Perjuangan) yang telah dirasakan oleh masyarakat ?

“Bantuan kesehatan seperti rumah sakit, alat pelindung diri buat kesehatan dimasa pandemik dan juga dibebberapa sektor lain seperti bantuan buat rumah ibadah dan pendidikan”. (Bapak Syahruldi kediamannya, Selasa, 08 Desember 2020, pukul 18.00 WIB)

“Sudah banyak aspirasi yang diserap oleh anggota DPRD Sumatera Utara Komisi E di daerah pemilihan I kecamatan Medan Perjuangan pada saat reses dilaksanakan dan tidak sedikit juga implementasi yang dilakukan dari penyerapan aspirasi tersebut misalkan bantuan usaha, pendidikan, sosial, dan lainnya”. (Ibu Cicadi kediamannya, Senin, 07Desember 2020, pukul 16.00 WIB)

Apa hal yang diharapkan masyarakat sehingga membuat kinerja anggota DPRD Sumatera Utara Komisi E berpengaruh di masyarakat?

“Memeratakan bantuan – bantuan kesehatan seperti BPJS kesehatan, dan KIS / PIB sehingga semua masyarakat bias merasakan kinerja dari anggota DPRD Sumatera Utara Komisi E tersebut. (Bapak Syahruldi kediamannya, Selasa, 08Desember 2020, pukul 18.00 WIB)

“Harapannya agar anggota DPRD Sumatera Utara Komisi E tidak melakukan korupsi dan meninggalkan budaya yang bersifat menyelewengkan hak – hak atau aspirasi dari masyarakat sehingga citra dari anggota DPRD Sumatera Utara tersebut lebih mempengaruhi kinerja anggota DPRD di saat ini”. (Ibu Cicadi kediamannya, Senin, 07Desember 2020, pukul 16.00 WIB)

Berapa kali anggota DPRD Sumatera Utara Komisi E Dapil I kecamatan Medan Perjuangan atau perwakilannya melakukan kunjungannya?

“Cukup sering melakukan kunjungan ataupun perwakilannya yang datang ke dapil I kecamatan Medan Perjuangan, kalau dihitung lebih dari 10 kali dalam setahun ini”. (Bapak Syahruldi kediamannya, Selasa, 08 Desember 2020, pukul 18.00 WIB)

“Saya tidak menghitung berapa kali anggota DPRD Sumatera Utara Komisi E Dapil I kecamatan Medan Perjuangan berkunjung ataupun perwakilannya yang berkunjung namun menurut saya beliau sangat lebih dari 10 kali kunjungan dalam setahun belakangan”. (Ibu Cicadi kediamannya, Senin, 07 Desember 2020, pukul 16.00 WIB)

Apakah menurut anda kinerja anggota DPRD Sumatera Utara Komisi E Dapil I kecamatan Medan Perjuangan periode 2019 – 2024 sudah meningkat? Jika sudah berikan alasannya.

“Belum meningkat dikarenakan komisi E meliputi kesehatan, dan sosial, dan secara keseluruhan bidang kesejahteraan rakyat. Penyaluran program dari komisi E belum tersalurkan sepenuhnya. Harapannya semua program – program dari komisi E dikesehatan dapat disalurkan dengan segera terutama bagi warga miskin”. (Bapak Syahrul di kediamannya, Selasa, 08 Desember 2020, pukul 18.00 WIB)

“Saya rasa belum cukup signifikan peningkatan dari periode sebelumnya sehingga menjadi pekerjaan bagi anggota DPRD Komisi E Dapil I kecamatan Medan Perjuangan untuk terus meningkatkan citra dan kinerjanya bagi masyarakat khususnya kecamatan Medan Perjuangan”. (Ibu Cica di kediamannya, Senin, 07 Desember 2020, pukul 16.00 WIB)

Apakah harapan masyarakat terhadap anggota DPRD Sumatera Utara untuk meningkatkan dan memajukan daerah pemilihannya di kecamatan Medan Perjuangan ?

1. Harapannya bantuan kartu BPJS kesehatan, KIS, dan PIB disalurkan tepat sasaran.
2. Anggota DPRD Sumatera Utara Komisi E mendengarkan aspirasi dari warga bahwa Rumah Sakit atau Puskesmas jangan mempersulit masyarakat dalam berobat ke RS / Puskesmas yang memepergunakan kartu KIS dan PIB.
3. Harapannya anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Komisi E tidak korupsi dan meninggalkan budaya dan praktik – praktik korupsi diperiode sebelumnya”. (Bapak Syahrul di kediamannya, Selasa, 08 Desember 2020, pukul 18.00 WIB)

“Harapannya anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Komisi E Dapil I turun ke lapangan seperti ke Rumah Sakit atau Puskesmas memonitoring kesehatan atau obat – obatan yang tersedia belum cukup memadai”. (Ibu Cica di kediamannya, Senin, 07 Desember 2020, pukul 16.00 WIB)

Adapun hasil dan dari wawancara yang dialami peneliti disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui bagaimana peranan komunikasi politik dalam peningkatan kinerja anggota DPRD komisi E di kecamatan Medan Perjuangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD komisi E namun meskipun begitu pencapaian kinerja dari anggota DPRD komisi E periode 2019 - 2024 dibandingkan periode 2014 – 2019 jauh lebih baik. Hal ini disebabkan karena pandemik covid-19 program yang ada pada bidang kesehatan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di kecamatan Medan Perjuangan. Sebaliknya bila anggota DPRD komisi E menaruh perhatian secara terus menerus dalam hal tersebut bisa membangkitkan kinerja DPRD komisi E.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan data penelitian cukup memberikan gambaran bahwa dari hasil penelitian ini menunjukkan peranan komunikasi politik DPRD Komisi E Dapil I di Kecamatan Medan Perjuangan mempengaruhi peningkatan kinerja DPRD Sumatera Utara komisi E dapil I kecamatan Medan Perjuangan. Ditunjukkan dengan peran komunikasi politik antara *stakeholder*, DPRD Sumatera Utara komisi E dapil I kecamatan Medan

Perjuangan dan masyarakat kecamatan Medan Perjuangan. Program dan aspirasi dari masyarakat yang tersalurkan serta peran konektifitas yang berkesinambungan antara Pemerintah dan DPRD menjadi hal pokok dalam mencapai tujuan dari peningkatan kinerja DPRD Sumatera Utara dapil I kecamatan Medan Perjuangan. Hambatan lain yang sering terjadi adalah perbedaan persepsi Pemerintah Daerah Sumatera Utara terhadap DPRD Sumatera Utara komisi E ataupun antara sesama anggota DPRD Sumatera Utara komisi E itu sendiri yang biasa menyebabkan terhambatnya aspirasi yang sudah diserap oleh anggota DPRD Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Sumatera Utara Komisi E dalam menyerap dan mengeksekusi aspirasi dari masyarakat dan *stakeholder* yang ada di kecamatan Medan Perjuangan akan mencapai tujuan dari komunikasi politik dalam peningkatan kinerja DPRD Sumatera Utara komisi E dapil I kecamatan Medan Perjuangan. Dalam hal peningkatan kinerja dari DPRD Sumatera Utara dibutuhkan sebuah hubungan yang selaras dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan *stakeholder* di kecamatan Medan Perjuangan terhadap Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Hubungan yang selaras tersebut akan memberikan dampak yang baik dalam melakukan dan mengeksekusi aspirasi masyarakat yang ada di Kecamatan Medan Perjuangan sehingga program yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara mudah terealisasi. Komunikasi Politik yang sering membuat perbedaan persepsi terjadi menimbulkan sulitnya program itu tersalurkan. Komunikasi Politik dalam mencapai tujuan kekuasaan sering sekali salah diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan, padahal komunikasi politik untuk mencapai kekuasaan tersebut dilakukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan masyarakat di dapil tersebut.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press. Yogyakarta.
- Anwar Arifin. 2010. *Komunikasi Politik: Filsafat - Paradigma - Teori - Tujuan – Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Arbi, Sanit. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. CV Rajawali. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1956. *Dasar – dasar Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Cangara Hafied. 2004. *Komunikasi politik konsep, teori, dan strategi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Cipto, Bambang. 2005. *DPR dalam Era Pemerintahan Modern - Industrial*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Sistem Politik di Indonesia*. Sinar Baru. Bandung
- Kartiwa, Asep. 2006. *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah*. Jurnal Administrasi Publik. Group. Jakarta.
- Keban, Jeremias.T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. dan Agus, Subando Margono. 2011. *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi – Organisasi public*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Predana Media
- Lumolos, Johny. 2013. *Penguatan Kapasitas DPRD di Era Reformasi*. Lepsindo. Bandung

- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Marijan, K. 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Kencana Predana Media Group. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara – Negara Berkembang*. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Pito, TA. 2005. *Mengenai Teori - Teori Politik*. Nuansa Cendikia. Jakarta.
- Rush dan Althoff. 1997. *Pengantar Sosial Politik*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Simamora, Bilson. 2004. *Riset Pemasaran (Falsafah, Teori, dan Aplikasi)*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Steers, Richard. M.2005. *Efektivitas Organisasi (Terjemahan)*. Erlangga. Jakarta
- Sumarno. 1989. *Dimensi – Dimensi Komunikasi Politik*, Bandung Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Surbakti, Ramlan. 2003. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Susanto, Astrid. 1985. *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Binacipta. Bandung
- Suwandi dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Varma. 1995. *Teori Politik Modern*. PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta.

